

**ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, DANA DESA,
DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN 10 KABUPATEN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Oleh:

RAHMALIA

(01021282025066)

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Analisis Pengaruh Belanja Modal, Dana Desa, dan Produk Dometik Regional
Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan 10 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan

Disusun Oleh,

Nama : Rahmalia
NIM : 01021282025066
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING



Tanggal, 17 April 2024

Dr. Anna Yulianita, S.E, M.Si
NIP. 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, DANA DESA, DAN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN 10 KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

Disusun oleh

Nama : Rahmalia
NIM : 01021282025066
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 17 Mei 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 17 Mei 2024

Pembimbing



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Penguji



Dwi Darma Puspita Sari, S.E., M.Si
NIDN. 0012119405

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN12-6-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmalia
NIM : 01021282025066
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Analisis Pengaruh Belanja Modal, Dana Desa, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan 10 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan

Pembimbing : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
Anggota : Dwi Darma Puspita Sari, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 17 Mei 2024

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 5 Juni 2024
Pembuat Pernyataan

ASLI

12-6-2024

JUR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Rahmalia
NIM. 01021282025066

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT., penulis mengucapkan terima kasih atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang telah melimpahkan keberkahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul "Analisis Pengaruh Belanja Modal, Dana Desa, Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan 10 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan " merupakan hasil karya penulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi di Universitas Sriwijaya. Melalui skripsi ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh Belana Modal (BM), Dana Desa (DD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam mempengaruhi tingkat Kemiskinan (K).

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, keluarga, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan, bantuan, masukan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang

membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang, Terima kasih.

Indralaya, Mei 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rahmalia', written in a cursive style.

Rahmalia
NIM. 01021282025066

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak sekali melewati berbagai macam rintangan dan hambatan, namun dengan perjuangan, doa, dan tentunya tidak luput dari berbagai bantuan, arahan, serta dukungan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sangat besar kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat-nya, pertolongan-nya, petunjuk-nya, serta ridho-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan penuh pembelajaran yang diperoleh di dalam proses ini.
2. Ibu Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, masukan, bantuan, serta dukungan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik, selain itu beliau telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk itu.
3. Ibu Dwi Darma Puspita Sari, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik dan benar.
4. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuannya kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Rusli, Ibu Herawati, dan nenek Uminah yang telah senantiasa memberikan doa dan restunya kepada penulis untuk menjalani perkuliahan, serta senantiasa memberikan berbagai macam dukungan baik itu dukungan moril dan juga materil sehingga penulis pada akhirnya dapat sampai pada titik ini. Selain itu, terimakasih atas segala kasih sayang, bantuan, dan juga dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan perkuliahan ini, hingga pada akhirnya mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Sriwijaya.
7. Kakak Heru Anggara, Adik Rahmat Hidayat, dan Saudara Fikri Rhomadhon, serta seluruh keluarga besar dan para sahabat penulis yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan skripsi, sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.

Indralaya, 15 Mei 2024



Rahmalia
NIM.01021282025066

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, DANA DESA, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN 10 KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh :
Rahmalia ; Anna Yulianita

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Belanja Modal, Dana Desa, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat Kemiskinan 10 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya secara parsial variabel Belanja Modal memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan, sedangkan variabel Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan 10 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan secara simultan variabel Belanja Modal, Dana Desa, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan 10 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022.

Kata kunci : Belanja Modal, Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto, dan Kemiskinan

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Ketua



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 19730406201012001



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITURE, VILLAGE FUNDS, AND GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT (GRDP) ON POVERTY LEVELS OF 10 DISTRICTS IN SOUTH SUMATRA PROVINCE

By :

Rahmalia ; Anna Yulianita

This research aims to analyze the influence of Capital Expenditures, Village Funds, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the poverty level of 10 districts in South Sumatra Province in 2018-2024. The data used in this research is secondary data obtained from the website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of South Sumatra Province, and the Central Statistics Agency (BPS). The analysis technique used is panel data regression with the selected model, namely the Fixed Effect Model (FEM). The results of this research state that partially the Capital Expenditure variable has a positive and insignificant influence on the poverty variable, while the Village Fund variable has a significant positive influence on the poverty level, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a significant negative influence on the poverty level of 10 districts in Sumatra Province South. Meanwhile, simultaneously the variables Capital Expenditure, Village Funds and Gross Regional Domestic Product (GRDP) have a significant influence on the poverty level variable for 10 districts in South Sumatra Province in 2018-2022.

Keywords : Capital Expenditures, Village Funds, Gross Regional Domestic Product, and Poverty

*Acknowledge by,
Head of Development Economics Departement*

Chairman



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 19730406201012001



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Rahmalia
	NIM	01021282025066
	Tempat, Tanggal Lahir	Serikembang, 22 April 2002
	Alamat	Serikembang 2, Kec. Payaraman, Kab Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan
	No. HP	085658922880
AGAMA	Islam	
JENIS KELAMIN	Perempuan	
STATUS KEWARGANEGARAAN	Warga Negara Indonesia	
TINGGI BADAN	154 Cm	
BERAT BADAN	48 Kg	
EMAIL	rahmalias02@gmail.com	
PENDIDIKAN		
2008-2014	SD Negeri 06 Payaraman	
2014-2017	SMP Seri Tanjung	
2018-2020	SMA Negeri 01 Tanjung Batu	
2020-2024	S-1 Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya	
PENGALAMAN ORGANISASI		
<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Departemen Kemuslimahan Ukhuwah FE UNSRI • Sekretaris Departemen Kerohanian IRGANSI (Ikatan Mahasiswa Universitas Sriwijaya Kecamatan Payaraman) 		

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.4.1 Manfaat Teoritis	18
1.4.2 Manfaat Praktis	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Pengeluaran Pemerintah	19
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	35
2.1.3 Transfer	36
2.1.4 Belanja Modal	37
2.1.5 Dana Desa	39
2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	42
2.1.7 Kemiskinan	44
2.2 Penelitian Terdahulu	48
2.3 Kerangka Pikir	55
2.4 Hipotesis	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Jenis Penelitian	59
3.2 Populasi dan Waktu Penelitian	59
3.3 Data dan Sumber Data	60

3.4 Definisi Operasional Variabel	60
3.4.1 Belanja Modal	60
3.4.2 Dana Desa	61
3.4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	61
3.4.4 Kemiskinan	62
3.5 Teknik Analisis	62
3.6 Pemilihan Estimasi Model	63
3.6.1 Common Effect Model (CEM)	63
3.6.2 Fixed Effect Model (FEM)	63
3.6.3 Random Effect Model (REM)	63
3.7 Uji Spesifikasi Model	64
3.7.1 Uji Chow	64
3.7.2 Uji Hausman	64
3.8 Uji Asumsi Klasik	65
3.8.1 Uji Multikolonieritas	65
3.8.2 Uji Heteroskedastisitas	65
3.9 Pengujian Hipotesis	66
3.9.1 Koefisien Determinasi (R^2)	66
3.9.2 Uji F Statistik	66
3.9.3 Uji t Statistik	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	68
4.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	68
4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	69
4.1.3 Topografi	70
4.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah	70
4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian	71
4.2.1 Belanja Modal	71
4.2.2 Dana Desa	72
4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	73
4.2.4 Kemiskinan	73
4.3 Tingkat Pertumbuhan Variabel Penelitian	75

4.3.1 Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal 10 Kabupaten di Sumatera Selatan	75
4.3.2 Pertumbuhan Realisasi Dana Desa 10 Kabupaten di Sumatera Selatan ..	77
4.3.3 Pertumbuhan Realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 10 Kabupaten di Sumatera Selatan	78
4.3.4 Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan 10 Kabupaten di Sumatera Selatan ..	80
4.4 Hasil Estimasi	82
4.4.1 Pemilihan Estimasi Model	82
4.4.2 Uji Asumsi Klasik	85
4.4.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel	87
4.4.4 Uji Statistik	92
4.5 Pembahasan	96
4.5.6 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan	96
4.5.7 Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan.....	97
4.5.8 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan	99
BAB V PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Indonesia Berdasarkan Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2022.....	4
Tabel 1. 2 Persentase Penduduk Miskin 10 Kabupaten Sumatera Selatan Berdasarkan Kabupaten/Kota	5
Tabel 1. 3 Realisasi Belanja Modal 10 Kabupaten di Sumatera Selatan (Miliar Rupiah).....	8
Tabel 1. 4 Realisasi Dana Desa 10 Kabupaten di Sumatera Selatan (Miliar).11	
Tabel 1. 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 10 Kabupaten di Sumatera Selatan	13
Tabel 4. 1 Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah 10 Kabupaten di Sumatera Selatan.....	69
Tabel 4. 2 Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal 10 Kabupaten di Sumatera Selatan tahun 2018-2022.....	75
Tabel 4. 3 Pertumbuhan Realisasi Dana Desa 10 Kabupaten di Sumatera Selatan (Miliar Rupiah).....	77
Tabel 4. 4 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 10 Kabupaten di Sumatera Selatan.....	79
Tabel 4. 5 Pertumbuhan Persentase Kemiskinan 10 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan (Persen)	81
Tabel 4. 6 Hasil Pemilihan Model Menggunakan Uji Chow	83
Tabel 4. 7 Hasil Pemilihan Model Menggunakan Uji Hausman	84

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolonieritas	85
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heterosdastisitas	87
Tabel 4. 10 Hasil Estimasi Regresi Data Panel Menggunakan Fixed Effect Model (FEM)	88
Tabel 4. 11 Hasil Uji t- Statistik	93
Tabel 4. 12 Hasil Uji F Statistik.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Persen)	1
 Gambar 2. 1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner.....	26
Gambar 2. 4 Dampak Transfer pada Anggaran Daerah	37
Gambar 2. 5 Lingkaran Kemiskinan menurut Nurkse	48
 Gambar 2. 6 Kerangka Pikir Pengaruh Belanja Modal, Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di 10 Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.	57

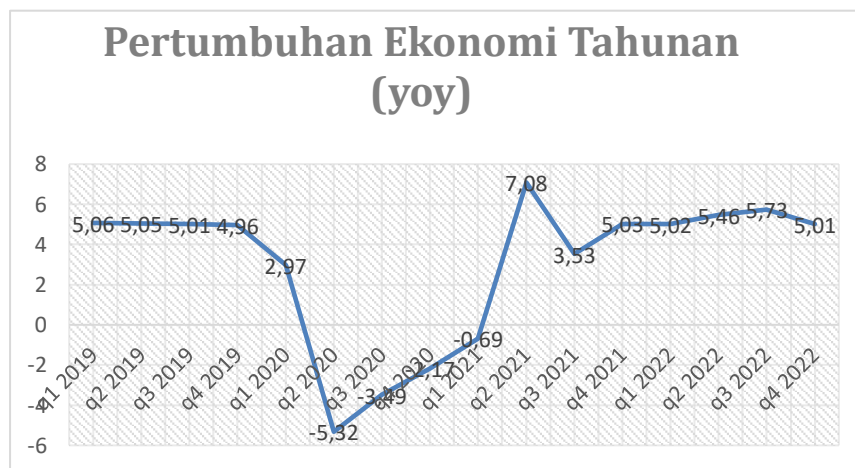
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang masih belum sejahtera secara ekonomi dan menghadapi masalah penduduk yang sangat serius, penduduknya berkembang dengan cepat dan sangat padat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi sangat penting untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan masyarakat, dan kemerdekaan politik.

Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup tinggi merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam upaya pembangunan negara. Tingkat pertumbuhan ini dapat diukur dengan produktivitas bangsa atau masyarakat setiap tahunnya, yang diukur dalam istilah ekonomi dan dihitung dengan besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut (Fuady, 2013). Berikut ini merupakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai Negara Berkembang :



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Melihat dari Gambar 1.1, diketahui bahwasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahunnya bahkan per kuartalnya. Pada tahun 2019 kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil dengan penurunan setiap kuartalnya namun sangat sedikit. Selanjutnya, dapat dilihat pada tahun 2020 pada kuartal 1 terlihat adanya penurunan yang cukup drastis pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang semula mencapai 4,96 persen pada kuartal 4 tahun 2019, turun menjadi 2,97 persen pada kuartal 1 tahun 2020 bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis pada kuartal 2 tahun 2020 dimana penurunan mencapai angka -5,32 persen dan kian semakin pulih sampai dengan kuartal 4 di tahun 2020 yang meningkat dari sebelumnya -3,49 persen menjadi -2,17 persen. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi di Indonesia, yang disebabkan oleh deflasi atau penurunan drastis dan ini juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 (CNBC Indonesia, 2023). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berfluktuasi dari tahun 2021 hingga 2022. Pada kuartal 2 tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dari titik terendahnya sebesar 2,07 persen pada tahun 2020. pekerjaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,46 persen dalam produksi, dan komponen ekspor barang dan jasa naik 24,04 persen dalam pengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kuat, mencapai 5,01 persen (yoy) pada triwulan IV 2022, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan tren melambat pertumbuhan ekonomi global. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan akan mencapai 5,31 persen (yoy) pada

tahun 2022, jauh lebih tinggi dari 3,70 persen pada tahun sebelumnya (Bank Indonesia, 2023).

Indonesia tidak serta merta mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Indonesia secara aktif melakukan pembangunan secara bertahap dan terencana sambil mempertahankan stabilitas dan pemerataan. Indonesia masih menghadapi banyak masalah sebagai negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan, meskipun pertumbuhannya sangat cepat (Retno, 2011). Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang merupakan masalah yang rumit di setiap wilayah atau negara termasuk di Indonesia, karena kemiskinan adalah masalah yang rumit yang mencakup banyak aspek dan sektor (Sendouw et al., 2019).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang secara finansial untuk memenuhi standar hidup rata-rata di suatu negara, ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat, akan disebabkan oleh pendapatan yang rendah ini (Ratulangi, 2019). Berikut ditampilkan data kemiskinan di 10 Provinsi Pulau Sumatera Indonesia selama 5 tahun terakhir :

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Indonesia Berdasarkan Provinsi di Pulau Sumatera 2018-2022

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin Pulau Sumatera				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	15,68	15,01	15,43	15,53	14,75
Sumatera Utara	8,94	8,63	15,43	15,53	14,75
Sumatera Barat	6,55	6,29	6,56	6,04	6,04
Riau	7,21	6,90	7,04	7,00	6,84
Jambi	7,85	7,51	7,97	7,67	7,70
Sumatera Selatan	12,82	12,56	12,98	12,79	11,95
Bengkulu	15,41	14,91	15,30	14,43	14,34
Lampung	13,01	12,30	12,76	11,67	11,44
Kep. Bangka Belitung	4,77	4,50	4,89	4,67	4,61
Kep. Riau	5,83	5,80	6,13	5,75	6,03

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020-2021

Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk miskin di Provinsi ini terus meningkat, mencapai 1.356720 ribu jiwa pada tahun 2020, dan telah menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi setelah Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk miskinnya selalu di atas 1 juta jiwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dan juga merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi urutan ke 10 di Indonesia (BPS Indonesia, 2023). Provinsi Sumatera Selatan memiliki sebanyak 17 Kabupaten, dimana dari ke 17 Kabupaten tersebut terdapat 10 Kabupaten dengan tingkat kemiskinannya tinggi dibandingkan dari Kabupaten lainnya. Dimana, saat ini kemiskinan adalah tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana kemiskinan dan pendapatan yang rendah merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, pengentasan kemiskinan

masih termasuk salah satu masalah terpenting di Indonesia, khususnya di 10 kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dari 17 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi dengan penduduk miskin terbanyak ke dua di Pulau Sumatera. Dalam periode 2018–2022, terjadi penurunan tingkat kemiskinan, tetapi tingkat kemiskinan rata-ratanya masih lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera atau secara nasional (Suryani, 2023). Berikut ini adalah angka persentase masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Kabupaten:

Tabel 1. 2 Persentase Penduduk Miskin 10 Kabupaten Sumatera Selatan Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin 10 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sumatera Selatan	12,80	12,71	12,66	12,84	11,90
Ogan Komering Ulu	12,61	12,77	12,75	12,62	11,61
Ogan Komering Ilir	15,28	15,01	14,73	14,68	13,23
Muara Enim	12,56	12,41	12,32	12,32	11,12
Lahat	16,15	15,92	15,95	16,46	15,61
Musi Rawas	13,76	13,37	13,50	13,89	13,34
Musi Banyuasin	16,52	16,41	16,13	15,84	15,19
Ogan Ilir	13,19	13,31	13,36	13,82	12,33
Empat Lawang	12,25	12,30	12,63	13,35	12,03
Penukal Abab Lematang Ilir	13,81	13,47	12,62	12,91	11,76
Musi Rawas Utara	19,12	19,12	19,47	20,11	18,45

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020-2022

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat sepuluh Kabupaten di Sumatera Selatan dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki persentase penduduk miskin tertinggi selama 5 tahun terakhir, dimana tingkat kemiskinannya mencapai 20,11 persen pada tahun 2021 dan ini merupakan

tingkat kemiskinan tertinggi di Musi Rawas Utara selama periode tahun 2018-2022. Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Ogan Ilir, Empat Lawang, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Ogan Komering Ulu berada di urutan berikutnya. Dimana, tingkat kemiskinan di sepuluh Kabupaten tersebut belum pernah berada pada angka 10 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan tingkat kemiskinan yang befluktuasi, kemiskinan di sepuluh Kabupaten di Sumatera Selatan cenderung lebih banyak menunjukkan peningkatan jika dilihat setiap tahunnya.

Dalam pembangunan, kemiskinan menjadi masalah yang kompleks, hal ini terlihat dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari perspektif ekonomi atau moneter. Mengingat bahwasanya kemiskinan merupakan masalah yang memiliki banyak aspek, perlu dilakukan berbagai tindakan dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat umum (Nonce et al., 2023). Provinsi Sumatera Selatan juga tidak lepas dari masalah kemiskinan terutama 10 Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Sejak UU No. 22 Tahun 1999 berlaku pada 1 Januari 2001, pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas keputusan perekonomian daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah tergantung pada pemerintah pusat, yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itulah, pemerintah pusat menerapkan kebijakan baru yang disebut kebijakan otonomi daerah, yang memberikan pemerintah daerah wewenang untuk mengatur diri mereka sendiri (Risalam, 2013). Di Indonesia, pembangunan wilayah harus direncanakan dengan cermat seiring dengan penerapan otonomi daerah. Rencana

penganggaran pembangunan yang dibuat dengan cermat dan didukung oleh pengelolaan pendapatan daerah yang efektif akan memastikan bahwa pembangunan akan berjalan dengan baik. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengubah kondisi kehidupan masyarakat adalah salah satu tujuan perencanaan pembangunan yang baik (Sendouw et al., 2019).

Selama era otonomi daerah, daerah memiliki banyak peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki. Namun, tidak dapat disangkal bahwa otonomi daerah sangat bergantung pada dana perimbangan yang diberikan pemerintah daerah setiap tahun. Dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, dana yang ditransfer ke daerah oleh pemerintah pusat akan menjadi sumber anggaran dan belanja yang paling besar. Itulah sebabnya, pengelolaan anggaran dan belanja yang dilakukan oleh berbagai program pembangunan lokal seharusnya pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain dengan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Sudah seharusnya, pengeluaran pemerintah daerah dapat mengurangi kemiskinan yang merupakan masalah kesejahteraan yang masih membelit sebagian besar masyarakat.

Pemerintah daerah harus memprioritaskan pos belanja yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan peraturan otonomi dan pengelolaan keuangan daerah. Pos belanja modal adalah pos yang paling langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran yang dianggap sebagai belanja modal adalah biaya yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dengan tujuan meningkatkan aset tetap inventaris yang menghasilkan keuntungan selama

lebih dari satu periode akuntansi. Hal ini termasuk biaya pemeliharaan yang bertujuan guna mempertahankan atau meningkatkan masa manfaat aset, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Ratulangi, 2019).

Dalam APBD tahun anggaran 2021, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan kepada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah (Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. Sumsel, 2021). Dibawah ini merupakan realisasi Belanja Modal 10 Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Selatan :

Tabel 1. 3 Realisasi Belanja Modal 10 Kabupaten di Sumatera Selatan (Miliar Rupiah)

Kabupaten	Realisasi Belanja Modal (Miliar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Musi Rawas Utara	323,94	394,41	267,16	195,68	335,18
Lahat	309,56	396,81	367,82	474,18	575,00
Musi Banyuasin	871,95	1.102,42	790,70	1.097,18	619,79
Ogan Komering Ilir	302,19	626,42	608,89	571,44	445,90
Musi Rawas	361,98	430,93	406,02	489,60	430,57
Ogan Ilir	275,67	323,24	264,32	259,28	321,63
Empat Lawang	248,44	253,15	278,17	376,71	243,87
Muara Enim	556,63	888,47	541,99	431,58	536,77
Penukal Abab					
Lematang Ilir	622,81	764,12	275,49	425,05	510,91
Ogan Komering Ulu	328,75	348,99	247,55	263,19	304,30

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018-2022

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, dapat dilihat realisasi Belanja Modal 10 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dimana, realisasi Belanja Modal tertinggi di alokasikan di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019 yakni mencapai 1.102,42 miliar rupiah, namun pada tada tahun berikutnya realisasi Belanja Modal

di Kabupaten Musi Banyuasin sangat berfluktuasi dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis, hingga mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2021 hingga tahun 2022 realisasi Belanja Modal di Kabupaten Musi Banyuasin kembali mengalami penurunan drastis. Sedangkan realisasi Belanja Modal terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir terdapat di Kabupaten Empat Lawang tahun 2022 yang hanya mencapai 243,87 miliar rupiah. Dilihat dari Tabel 1.3 di atas, realisasi anggaran belanja modal Kabupaten Empat Lawang merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan 9 Kabupaten lainnya selama periode tahun 2018-2022, dimana menurut Pemda Sumatera Selatan pada tahun 2018 realisasi belanja modal Kabupaten ini hanya tercapai sebanyak 43 persen dari target.

Selain sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri, indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan belanja daerah pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Belanja modal, yang merupakan belanja pemerintah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar belanja modal, semakin besar pengaruh yang dimilikinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang lebih besar dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas di beberapa sektor yang terkait dengan PDRB, seperti industri, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang lebih besar juga dapat membantu proses pembangunan wilayah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi atau menyelesaikan kemiskinan (Rahmawati & Khusaini, 2018).

Nawacita merupakan program agenda prioritas pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nawacita adalah konsep yang terdiri dari sembilan inisiatif untuk perubahan yang bertujuan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat secara politik dan mandiri di berbagai aspek. Berdasarkan kebijakan nawacita pasal ketiga, kebijakan ini membuat strategi membangun Indonesia dari pinggir dan memperkuat pembangunan daerah terutama desa, program Dana Desa termasuk dalam program pembangunan desa (Yelvita, 2022). Menurut Undang-Undang Desa tahun 2022, dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat disebut sebagai dana desa. Dana ini digunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan program pembangunan dan pembinaan.

Fokus utama Dana Desa adalah untuk membiayai program dan kegiatan lokal desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan menghentikan kemiskinan. Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi desa dimana, pencapaian target RPJMDes dan RKPDes dievaluasi setiap tahun. Program Dana Desa memiliki lima tujuan, salah satunya adalah menurunkan tingkat kemiskinan, terutama di desa. Cara pemerintah adalah memberdayakan masyarakat desa melalui peningkatan proses pelayanan publik di desa. Berikut merupakan realisasi Dana Desa 10 Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Selatan.

Tabel 1. 4 Realisasi Dana Desa 10 Kabupaten di Sumatera Selatan (Miliar)

Kabupaten	Realisasi Dana Desa 10 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan (Miliar)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Musi Rawas Utara	83,18	101,74	100,81	100,85	79,97
Lahat	269,16	301,18	302,65	301,34	283,37
Musi Banyuasin	194,51	227,97	232,89	233,44	219,80
Ogan Komering Ilir	253,19	292,45	292,76	297,02	290,66
Musi Rawas	166,80	191,13	189,37	189,37	177,34
Ogan Ilir	176,33	204,57	202,14	202,05	192,07
Empat Lawang	112,22	128,14	130,21	130,72	125,55
Muara Enim	208,16	238,80	236,15	236,32	226,09
Penukal Abab Lematang Ilir	65,06	77,20	77,73	77,93	65,63
Ogan Komering Ulu	118,18	135,50	136,93	137,29	127,75

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018-2022

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat realisasi Dana Desa yang telah disalurkan per Kabupatennya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Realisasi Dana Desa tertinggi terdapat di Kabupaten Lahat, dimana realisasi Dana Desa mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sebesar 302,65 miliar rupiah bahkan selama lima tahun terakhir realisasi Dana Desa di Kabupaten Lahat selalu menjadi yang tertinggi setiap tahunnya. Sedangkan realisasi Dana Desa terendah terdapat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PAL Ilir) dimana dalam lima tahun terakhir, Dana Desa Kabupaten PAL Ilir belum pernah mencapai angka 100 miliar rupiah selama kurun waktu lima tahun terakhir dengan Jumlah tertinggi mencapai 77,93 miliar rupiah pada tahun 2021, dimana dari tahun 2018 hingga tahun 2021 realisasi Dana Desa di Kabupaten ini mengalami peningkatan namun sangat sedikit, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu menjadi sebesar 65,63 miliar rupiah.

Penyaluran dana desa memiliki banyak tujuan, salah satunya adalah untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, desa diharapkan dapat menjadi desa yang mandiri dan mendorong pembangunan yang merata, dimana disparitas pembangunan antar daerah dapat dikurangi dengan pembangunan yang merata. Oleh karena itu, untuk menghentikan kemiskinan, program dana desa, yang diatur oleh Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat digunakan (Rachman et al., 2023).

Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga harus diperhatikan selain anggaran dana desa. Pertumbuhan PDRB yang kian membaik menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah (Muliza, 2022). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua bisnis (unit usaha) di suatu wilayah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh aspek ekonomi. PDRB dengan harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga pada tahun tertentu, yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan tahun 2000. Sebaliknya, PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu, yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan tahun 2000. PDRB yang didasarkan pada harga berlaku dapat digunakan untuk mengevaluasi struktur dan pergeseran ekonomi. Di sisi lain, harga konstan dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Bappeda Sumsel, 2013). Pertumbuhan ekonomi adalah faktor penting dalam penurunan kemiskinan di suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk

mengurangi tingkat kemiskinan (Nabila, 2015). Menurut Pusat Statistik, perubahan nilai PDRB diukur dengan harga konstan. Nilai barang atau jasa yang dihitung dengan harga pada tahun tertentu disebut Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, yang berarti data yang digunakan tidak terpengaruh oleh tekanan inflasi (Padriyansyah, 2022). Berikut ini merupakan data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kabupaten/Kota :

Tabel 1. 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 10 Kabupaten di Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ogan Komering Ulu	9 339,33	9 867,73	9 866,72	10 116,56	10 683,32
Ogan Komering Ilir	19 205,73	20 180,57	20 228,21	20 909,48	21 993,06
Muara Enim	38 854,44	41 581,53	41 594,54	44 257,27	47 970,37
Lahat	11 723,72	12 382,33	12 427,42	13 022,37	13 920,58
Musi Rawas	12 921,71	13 680,64	13 712,55	14 032,62	14 602,02
Musi Banyuasin	42 670,21	44 620,40	44 604,66	46 129,29	48 097,66
Ogan Ilir	7 113,26	7 482,61	7 492,94	7 775,12	8 168,68
Empat Lawang	3 349,00	3 470,33	3 473,40	3 605,94	3 784,49
Penukal Abab					
Lematang Ilir	4 430,55	4 703,60	4 716,96	4 819,89	5 033,47
Musi Rawas Utara	5 331,25	5 552,59	5 573,36	5 706,54	5 961,63

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018-2022

Berdasarkan data pada Tabel 1.5, dari sepuluh Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, tingkat PDRB tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin terutama pada tahun 2022 dimana PDRB Kabupaten ini mencapai angka 48 097,66 miliar rupiah dimana dalam kurun waktu 2018-2022 PDRB di Kabupaten Musi Banyuasin senantiasa meningkat setiap tahunnya yaitu tetap berada pada angka 4 triliun, dimana hal ini menunjukkan bahwasanya

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten ini juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun Kabupaten dengan PDRB nya paling rendah terdapat di Kabupaten Empat Lawang, dimana tingkat PDRB nya selama lima tahun terakhir hanya berhasil mencapai angka 3 triliun. Khususnya pada tahun 2018 yang terdapat tingkat PDRB paling rendah yakni hanya mencapai angka 3.349,00 miliar rupiah, namun meskipun demikian tingkat PDRB di Kabupaten Empat Lawang senantiasa mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengukur nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di seluruh wilayah pada tahun atau waktu tertentu, seringkali dalam satu tahun. Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, pertumbuhan ekonomi daerah juga dapat diukur dengan menggunakan PDRB. Dalam hal ini, PDRB merupakan faktor penting dalam menurunkan proporsi penduduk miskin di suatu daerah (Cholili, 2014).

Untuk menangani kemiskinan yang telah berkembang menjadi masalah yang kompleks dan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun regional, diperlukan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan (Iqraam, 2019). Menurut (Putro, 2018) secara teori, investasi memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat. Maka, diharapkan kemiskinan dapat menurun seiring dengan peningkatan belanja modal, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih menjangkau seluruh masyarakat agar masyarakat tidak terbatas dalam penguasaan sumber – sumber ekonomi yang tersedia bagi mereka. Namun, (Mukarramah et al.,

2019) dalam studi analisis “Pengaruh Belanja Modal dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur” menemukan bahwa belanja modal mempunyai dampak yang kecil dan tidak menguntungkan terhadap kemiskinan karena program pemerintah yang tidak tepat sasaran dan gagal menurunkan kemiskinan. Program yang dicanangkan belum mampu menyentuh pada masalah dasar masyarakat dan dianggap tidak lengkap, sementara, dan reaktif.

Salah satu faktor pendorong kegiatan ekonomi daerah yaitu infrastruktur jalan, adanya ketersediaan akses transportasi memudahkan mobilitas masyarakat dan barang dalam kegiatan ekonomi, sehingga menjadi lebih efisien. Adanya belanja modal diharapkan dapat membantu mengoptimalkan pelayanan publik terhadap pembangunan ekonomi agar bisa memicu tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi baru di daerah serta memudahkan akses menuju pusat-pusat ekonomi, maka untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan dukungan anggaran yang memadai (Siti, 2021).

Menurut (DJP, 2021), tujuan utama dari Dana Desa adalah memperkuat perekonomian desa melalui bantuan langsung tunai ke desa dan pengembangan sektor-sektor prioritas lokal, seperti penciptaan desa digital dan wisata. Dalam (Muliza, 2022) disebutkan, salah satu tujuan program dana desa adalah membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pendekatan ini dimaksudkan agar pembangunan dapat berlangsung secara berkeadilan, misalnya dari desa ke kota. Selain itu, program ini membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam mengatur dan mengembangkan desanya sendiri. Namun pada sebagian kenyataannya, Dana Desa yang telah disalurkan masih belum bisa

menyentuh dan menekan angka kemiskinan secara langsung, dimana berdasarkan penemuan oleh (Muliza, 2022) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)” Dana desa di Provinsi Aceh mempunyai dampak yang kecil terhadap pengentasan kemiskinan karena dana tersebut banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya menurut (Damanik & Sidauruk, 2020) karena PDRB yang tinggi memungkinkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal, tingkat kemiskinan akan ditekan. Sebaliknya, PDRB yang rendah akan meningkatkan tingkat kemiskinan karena pembangunan yang dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat belum bisa maksimal. Namun pada penelitian (Padriyansyah & Syahputera, 2022) yang berjudul "Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan" menemukan bahwa kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan secara parsial tidak dipengaruhi oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh Belanja Modal terhadap Kemiskinan, Dana Desa terhadap Kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan telah menemukan banyak hal yang berbeda tentang bagaimana masing-masing faktor tersebut mempengaruhi kemiskinan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Mukharramah et al., 2019), yang berjudul "Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur" menemukan bahwa meskipun belanja modal mempunyai dampak negatif dan kecil terhadap kemiskinan di

Kabupaten Aceh Timur, belanja modal juga mempunyai dampak besar terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur secara bersamaan (simultan).

Adanya penemuan yang sesuai dengan teori, namun ada pula penemuan yang kurang sesuai dengan teori hal ini tentunya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, yang tentunya perbedaan wilayah tempat penelitian tersebut dilakukan, tahun penelitian dilakukan, kebijakan-kebijakan ekonomi yang berbeda di setiap daerahnya, hingga metode penelitian pun yang tentunya hal tersebut akan sangat mempengaruhi hasil temuan sebuah penelitian. Oleh sebab itu, dengan dilakukannya penelitian dengan berjudul "Analisis Pengaruh Belanja Modal, Dana Desa, dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di 10 Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan" akan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Belanja Modal, Dana Desa, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya di 10 Kabupaten Sumatera Selatan yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh Belanja Modal (DD), Dana Desa (DD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan (K) di 10 Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal, Dana Desa (DD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan (K) di 10 Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memahami teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengeluaran pemerintah, teori belanja modal, teori dana desa, teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan teori kemiskinan. Dan dalam rangka memerangi kemiskinan di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lain. Dengan demikian, upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipahami melalui penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat praktis karena dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengatur APBD untuk menekan angka kemiskinan di daerah melalui program pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data rinci tentang data dan kondisi, termasuk hambatan, peluang, dan dampak positifnya jika pemerintah daerah memutuskan untuk menggunakan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Y. I. (2022). *The Effect of Village Income and Gross Regional Domestic Product on Poverty in Indonesia*. *Jurnal Bina Praja*, 315-328.
- Alamsyah, I. F. (2020). Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Timur. *Ideas Publishing*, 1-95.
- Alhudori, M. (2017). Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. *Jurnal Of Economics And Business*, 115.
- Alvaro, R. (2020). Menakar Peran Dana Desa dalam Menekan Kemiskinan Desa. *Analisis RKP dan Pembicaraan Pendahuluan APBN*, 1-16.
- Alvaro, R. Z. (2019). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Budget*, 106-124.
- Anisah, S. (2023). CNBC Indonesia. Diakses pada 15 November 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230207115016-4-411721/awas-kaget-5-ekonom-top-beberkan-situasi-indonesia-terkini>.
- Arifin, Z. (2009). Memahami PDRB sebagai Instrumen untuk Mengukur Pertumbuhan Ekonomi di Daerah. *Bappeda.Jambiprov.Go.Id*, 1-3.
- Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 05(01), 1–37.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*. Jakarta: Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). *Laporan Perkembangan Pencapaian Pembangunan Milenium Indonesia 2004*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Basri, F. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Cholili, F. M. (2014). Analisa Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(5), 557–577.
- Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pdrb Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*,

28(3), 358. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.800>.

Departemen Komunikasi. (2023). Bank Indonesia. Diakses pada 15 November 2023, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_252823.aspx#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,global%20yang%20dalam%20tren%20melambat.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021, Oktober 1). *Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=20948>

Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Fuady, W. (2013). Kajian Teori dan Implementasi Pembangunan Terhadap Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Furqani, A. T. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemkab Sumenep (Periode 2009-2013). *Performance " Jurnal Bisnis & Akuntansi"*, 35.

Ghozali, I. (2017). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. *Badan Penerbit-Undip*.

Himawan Yudistira Dama, A. L. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. 556.

Indonesia, Pemerintah Pusat. 2014. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.

Indonesia, Pemerintah Pusat. 2010. Undang-Undang No.10 Tahun 2010 Tentang Belanja Modal. Jakarta

Indonesia, Pemerintah Pusat. 2010. Undang-Undang No.71 Tahun 2010 Tentang Belanja Modal. Jakarta.

Indonesia, Pemerintah Pusat. 2004. Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Kemiskinan. Jakarta.

Indonesia, Pemerintah Pusat. 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta.

Iqraam, I. M. (2019). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesempatan Kerja, dan Persentase Penduduk Sektor Informal Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Vol.8.No.7.

Karimuddin Abdullah, M. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012).

Kasiram. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Postur APBN Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Serial Keuangan Daerah – Urgensi Keuangan Daerah. [Diakses pada 26 November 2023].
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kusuma, H. (2017). *Flypaper Effect: Fiscal Illusion and Bureaucratic Model*. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 27-39.
- Lunawati, A. S. (2022). *The Effect of Population, HDI, and Grdp on the Level of Poverty in the Kedu Residency*. *Journal Of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues (Marginal)*, 68-85.
- Mangkoesebroto, G. (1994). *Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mukarramah. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 13.
- Muliza, M. (2022). Pengaruh Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.23969/oikos.v6i1.4056>
- Nabilah, R. S. (2022). Apakah Bantuan Sosial dan Belanja Modal Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan? *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 85-89.
- Nabila, H. A. (2015). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2), 1–16. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2271>
- Nasional, B. P. (2004). *Laporan Perkembangan Pencapaian Pembangunan Milenium Indonesia 2004*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan.
- Nilam Indah Susilowati, Y. H. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 189-202.

- Ningrum, I. (2020). *Ekonomi Publik*. Surabaya: PT Muara Karya.
- Nonce Y. Manggong, V. A. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 122-133.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press.
- Padriyansyah, R. (2022). Analisis PDRB, IPM, dan Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 31.
- Pembangunan, B. P. (2004). *Laporan Perkembangan Pencapaian Pembangunan Milenium Indonesia 2004*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Prasetya et al. (2020). *The Effect Of Village Fund, Pad, and Education On Economic Growth*. *RJOAS*, 52-59. *Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4567>
- Putro, P. B. (2018). Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Inovasi*, 135.
- Perdana. (2018). Konsep Pembangunan Ekonomi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://e-journal.uajy.ac.id/675/3/2EP15298.pdf>
- Rachman, A., Kornita, S. E., & Tampubolan, D. (2023). Pengaruh Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Langsung terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2016–2020. *Jesya*, 6(1), 408–421. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.870>
- Rahmawati, S., & Khusaini, M. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemiskinan Melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004–2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 6(1–11). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5181>
- Ratulangi, U. S. (2019). *Analisis Dampak Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan Kota-Kota di Sulawesi Utara*. 20(3), 1–13.
- Rarun, P. K. (2019). Analisis Dampak Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan Kota-Kota di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.20 No.3.1-13*
- Republik Indonesia. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2014.
- Retno, E. K. (2011). Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2004, 1–20. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/download/3579/6182>

- Runtunuwu, P. C. (2023). *Capital Expenditure, Social Expenditure and Economic Growth Versus Poverty Level: A Study in North Maluku, Indonesia. International Journal of Professional Business Review.*
- Ridwan, I. (2021). *Buku Ekonomi Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Risalam, F. (2013). Analisis Tingkat Kemiskinan, Ketersediaan Infrastruktur Sekolah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal* <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.
- Sangadji, A. d. (2015). Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sosial dan Pembangunan.*
- Sari, S. a. (2017). Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak. 40-42.
- Sendouw, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 1-15.
- Setianingsih, I. (2017). Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi. *Magister Mahasiswa Ekonomi*, 1-18.
- Sitepu, S. N. (2023). *Effect of Access to Electricity, Access to Sanitation, Decent Drinking Water, Education, GDP, Population and Capital Expenditure on The Percentage of Poor People. Indonesian Jurnal Of Economics And Management.*
- Siti, N. K. (2021). Pengaruh Dana Desa, Pengangguran, Belanja Modal, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten di Provinsi Lampung. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.
- Soebagio, D. (2007). Kausalitas Granger PDRB terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Dati I Jawa Tengah. *Ekonomi Pembangunan.*
- Soemardjan, S. A. (1980). *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai.* Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.
- Suminto, (2004), Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara, Ditjen Anggaran, Depkeu, Jakarta.
- Sukirno, S. (2015). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, I. (2003). *Ekonomika Pembangunan, Edisi keenam,.* Yogyakarta: BPFE, UGM.

- Suryani, A., & Keselamatan, P. T. (2023). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. 2(1)
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan ekonomi jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Triariani, E. E. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi*, 7.
- Vitara Agatha, S. U. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Pengentasan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi di Provinsi Papua. *Jurnalku*, 156-176.
- Wahyu R., T. (2009). Kemiskinan dan Bagaimana Memerangnya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 56-65.
- Wahyuni, E. (2011). Unikom Estin Wahyuni-13. 11-22. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1960/8/UNIKOM_Estin_Wahyuni_13.BAB II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1960/8/UNIKOM_Estin_Wahyuni_13.BAB%20II.pdf)
- Wardani, S. A. (2023). *Analysis of Factors Influencing the Number of Poor People on the Island of Sumatra*. *Bengkulu International Conference on*, 9-16.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yelvita, F. S. (2022). No Title, 8.5.2017, Pengaruh Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Indonesia Pada Tahun 2016-2021.
- Yulianita, A., & Marissa, F. (2020). *Penerapan Aplikasi Software Pada Penelitian Ilmiah* (p. 34). Palembang: UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Yustika, A. E. (2009). *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.